

# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023

🏠 Jl. Raya Tulangan No.3, Tulangan, Sidoarjo  
☎ 031 8856226  
📠 031 8851085

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- 1. Menarik minat dan kepercayaan masyarakat baik sekitar Ds. Tulangan, Ds. Tarik ,Kab. Sidoarjo dan masyarakat pada umumnya,
- 2. Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip -prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR,
- 3. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- 4. Melindungi kepentingan stakeholder,
- 5. Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR Toelangan Dasa Nusantara
- 6. Menjaga kelangsungan usaha

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

#### **3 Responsibility**

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

#### **5 Fairness**

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi

## BAB II

# TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ESTI RAHAYU, SH
	NIK	: 3525154411680001
	Jabatan	: 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan terkait kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li><li>2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR</li><li>3. Direksi Wajib menerapkan Tata Kelola dan Prinsip GCG pd setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li><li>4. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan</li><li>5. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan</li><li>6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK</li><li>7. Melaksanakan penerapan fungsi manajemen risiko</li><li>8. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat</li><li>9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan</li><li>10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan</li></ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: LINDAWATI MOESTADJAP, SE
	NIK	: 3374136610620002
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR</li></ol>

2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor Bank terutama marketing
3. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan
4. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja naggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat
5. Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah, OJK dan anggaran dasar BPR
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang semakin pusat dan beragam
4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan / bagiannya
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK
	NIK	: 3374131012730002
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi</li> <li>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</li> <li>3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR</li> </ol>

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRA TITIK HERNAWATI

NIK	: 3517094403670005
Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi</li> <li>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</li> <li>3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</li> <li>4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR</li> </ol>

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi  
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

**3. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

4. **Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	: -

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ESTI RAHAYU, SH	3525154411680001	-	-
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	3374136610620002	-	-

2. **Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ESTI RAHAYU, SH	3525154411680001	0	NIHIL	-
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	3374136610620002	0	NIHIL	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. **Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ESTI RAHAYU, SH	3525154411680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	3374136610620002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ESTI RAHAYU, SH	3525154411680001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	3374136610620002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	3374131012730002	-	-
2	DRA TITIK HERNAWATI	3517094403670005	-	-

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	3374131012730002	0	NIHIL	-
2	DRA TITIK HERNAWATI	3517094403670005	0	NIHIL	-

## E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	3374131012730002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA TITIK HERNAWATI	3517094403670005	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	3374131012730002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRA TITIK HERNAWATI	3517094403670005	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	240.500.000	2	156.000.000
2	Tunjangan	2	110.500.000	2	22.800.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		351.000.000		178.800.000

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Masing-masing Direksi mendapat fasilitas transportasi berupa 1Unit Mobil Avanza	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	-
4	Fasilitas lainnya	- Penggantian biaya bahan bakar dan biaya tol	- Penggantian biaya bahan bakar dan fasilitas penginapan

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,92	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,36	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,57	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,56	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-6	3	Agenda rapat Triwulan I Tahun 2023 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Pencapaian Target RBB bulan Maret 2023 2. Penerapan Prosedur kredit dan Tata Kelola 3. Penerapan Manajemen Risiko
2	2023-7-27	4	Agenda rapat Triwulan II Tahun 2023 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Rencana dan Evaluasi Kerja (Perbandingan antara Rencana dan Realisasi ) 2. Evaluasi Perkembangan KYD dan NOA 3. Evaluasi terhadap profil risiko 4. Evaluasi penerapan APU PPT 5. Pemantauan ketentuan dan pengelolaan SDM 6. lain-lain
3	2023-11-3	4	Agenda rapat Triwulan III Tahun 2023 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): L Pencapaian Target RBB bulan Oktober 2023 a. Realisasi pelaksanaan RBB bulan Oktober 2023 b. Ratio tingkat kesehatan bank Oktober 2023 2. Pengawasan dibidang perkreditan a. Perkembangan kolektibilitas Oktober 2023 b. Laporan kredit debitur besar c. Kredit bermasalah 3. Kantor Kas
4	2023-12-7	7	Agenda rapat pembahasan dan persetujuan RBB tahun 2023 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): 1. Dana Pihak Ketiga 2. Kredit yang diberikan 3. Laba rugi 4. SDM 6. Rasio Keuangan

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK	3374131012730002	4	0	100,00%
2	DRA TITIK HERNAWATI	3517094403670005	4	0	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1	Tubagus Milla Gideon Budiman	Keluarga Pemegang Saham	3471052702790002	Esti Rahayu, SH	Direktur Utama	3525154411680001	Sewa mobil kantor	11	Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan operasional BPR

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-04-11	Sosial	Sumbangan Santunan Kepada Anak Yatim dan Duafa	Masjid Roudotul Jannah Tulangan	500.000
2	2023-06-21	Sosial	Partisipasi HUT RI ke 78	Koramil	200.000

**M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara tahun 2023 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Saran dan kritik dari stake holder, dan OJK sangat kami harapkan untuk perkembangan BPR yang lebih baik lagi dikemudian hari. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, Terima Kasih.

Sidoarjo, 30 Januari 2024  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

  
**R.D ANTO WIDIYATMOKO M. AK**  
Komisaris Utama

  
  
**ESTI RAHAYU, SH**  
Direktur Utama



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665784-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601086-30012024155806

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_toelangandn@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-30 15:58:06



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.